

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : ENDANG WINARNI

NIK : 3402075508680002

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA HUKUM

Jenis Laporan : Periodik - 2024

Tanggal Kirim : 14 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

.....
Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

- Nama : ENDANG WINARNI
- Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA HUKUM
- NHK : 426605

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	95.000.000
1. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2008, HASIL SENDIRI	Rp.	60.000.000
2. MOTOR, HONDA F1C02N28L0 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI	Rp.	14.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2022, HASIL SENDIRI	Rp.	21.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	200.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	295.000.000
III. HUTANG	Rp.	5.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	290.000.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.